



Buletin Parlementaria



3 Merdeka,
Bangun
Masyarakat
Sejahtera



10 Jangan Ada
Kompromi dengan
Mafia Tanah



**Penegakan
Hukum
Harus
Diperbaiki**



**Investigasi
Kasus Bunuh Diri
Mahasiswi
Undip**



Beri Ruang APBN Bagi Pemerintahan Baru

Nomor 1307/IV/VIII/2024 Agustus 2024



9 772614 339005



Beri Ruang APBN Bagi Pemerintahan Baru



FOTO: DEP/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Joko Widodo saat pembukaan masa sidang pertama 2024-2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani telah menerima Pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan menekankan pentingnya memberikan ruang bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pengelolaan APBN 2025.

"Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Pemerintahan baru sehingga Pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun

pertamanya," tutur Puan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Puan juga menyampaikan bahwa DPR dan Pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025.

Ia menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan pada kepentingan rakyat, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa

Pemerintah harus memiliki indikator yang jelas dalam alokasi anggaran setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan belanja negara yang berkualitas.

"Pemerintah harus menyelesaikan berbagai masalah struktural seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Puan menilai Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang demi menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

rnm/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Merdeka, Bangun Masyarakat Sejahtera



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, saat menyampaikan pidato terkait RAPBN di Sidang Paripurna DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya terkait RAPBN menyampaikan persoalan pembangunan kesejahteraan masyarakat itu tidak berdiri sendiri. Ia tetap membutuhkan pembangunan

karakter dari masyarakat itu sendiri. Nahasnya, optimisme akan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan pembangunan sisi integritas dan etos kerja masyarakatnya.

“Di tengah maraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara,” ungkap Puan membuka agenda Sidang Tahunan Parlemen, Jumat (16/8).

Memang, dunia sedang diuji, termasuk Indonesia, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik antar negara, krisis pangan dan krisis energi global melahirkan situasi yang tidak ideal berselimut ketidakpastian. Untuk itu, Puan mengingatkan DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah harus terus dapat mendengarkan suara rakyat.


“Kita, secara kolektif, harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia, memiliki arah dan tujuan bersama,” ujarnya.  **um/rdn**

FOTO: DEP/PTD

Scan QR untuk berita selengkapnya



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom,
Ubalid Faurizal, S.I.Kom, Shane Saveria Sa'diyah, S.I.Kom.,
Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi
Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimban,
Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie,
Balggsy Maeshynthia, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,
Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Tahir, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

DPR Sudah Rampungkan 126 UU



FOTO: MJN/FPD

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa persidangan pertama DPR Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap berbagai hasil kinerja DPR periode 2019-2024. Hal tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa persidangan pertama DPR Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

"Sesuai dengan amanat konstitusi, DPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah untuk membentuk undang-undang," kata Puan.

Dalam memenuhi kebutuhan

hukum nasional, DPR RI bersama Pemerintah disebut harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi Undang-Undang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat. Kemudian, kata Puan, dengan mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 Undang-Undang yang telah selesai

dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI," terangnya.

Pada masa Persidangan ini, Puan menyebut DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.

"Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah Undang Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045," paparnya. **tn/aha**



Gejolak Global Uji Ketahanan Bangsa

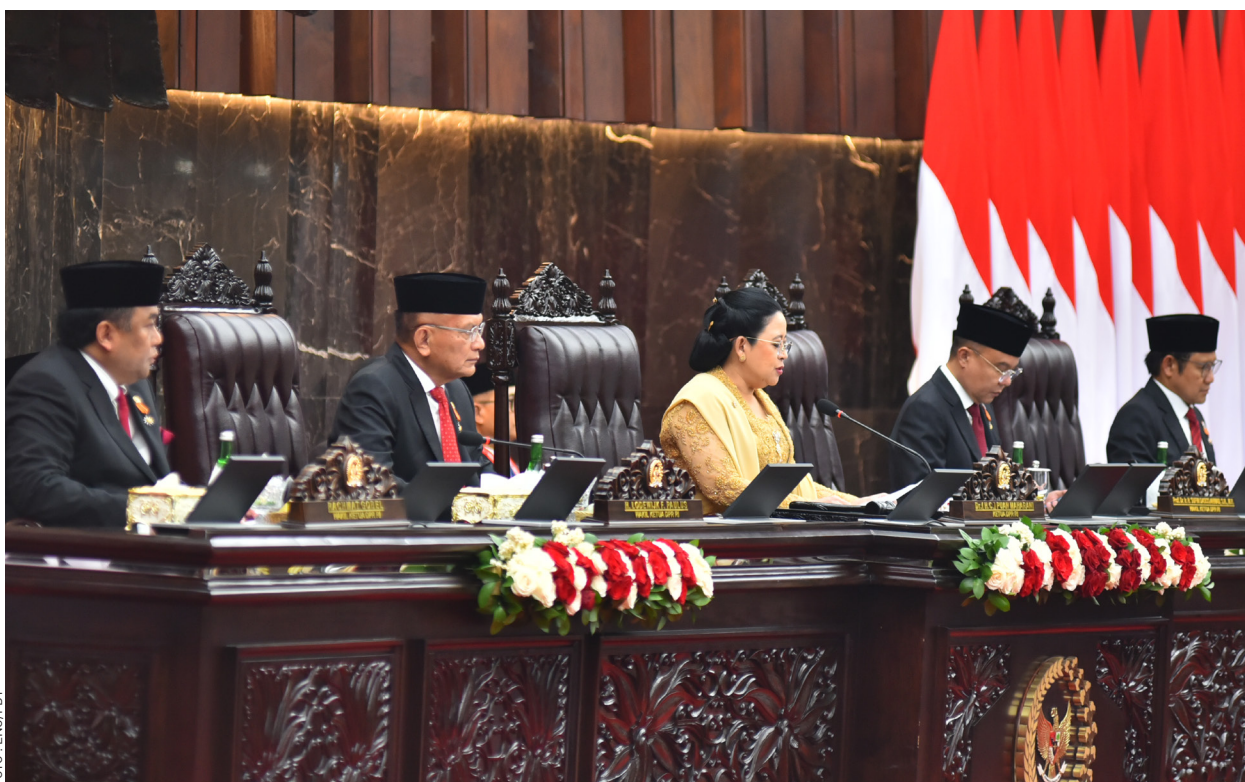


FOTO : ENO/PDT

Ketua DPR RI, Puan Maharani saat membuka masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dampak signifikan dari gejolak dan ketidakpastian global terhadap kehidupan bangsa dan negara. Menurutnya, krisis yang terjadi di tingkat internasional telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan nasional, mulai dari ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, hingga ekonomi.

"Gejolak dan ketidakpastian global tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara," ujar Puan saat membuka masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025 di

Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). "Bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun, seolah diuji," tambahnya.

Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan juga menjelaskan bahwa APBN, yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, turut terkena dampak dari situasi global ini. Ia menyoroti adanya koreksi yang sangat dalam terhadap ruang fiskal yang membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah sulit.

"Penurunan penerimaan

perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar telah memaksa kita untuk menempuh pilihan pahit dengan penarikan utang yang sangat besar," terang Puan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Puan mengapresiasi gotong royong dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan serta elemen bangsa dalam menghadapi krisis ini. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI, BUMN, swasta, UMKM, dan seluruh rakyat Indonesia.

ssb/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bangun Bangsa, Narasi Kebencian Harus Dihentikan



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menyebut bahwa DPR RI berkomitmen untuk bersama membangun bangsa. Terlebih, ancaman krisis global saat ini membayangi kondisi Indonesia.

"Tapi setidaknya-tidaknya kami dari DPR memiliki komitmen bersama ayo kita bergandengan tangan, bangsa kita baru keluar dari COVID-19, krisis dan kita juga menghadapi ancaman krisis global," ujar Willy dalam diskusi sebelum penyelenggaraan Sidang Tahunan 16 Agustus di selasar

Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta (16/8).

"Kami di DPR *full back up* untuk kemajuan kita bersama-sama." imbuhnya. Menurutnya, kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo perlu diapresiasi berdasarkan capaiannya. Capaian yang ia maksud yakni adanya IKN, infrastruktur dan *omnibus* yang digalakkan pemerintah.

"Ya (*omnibus law*) sebagai sebuah mekanisme yang mensimplifikasi peraturan perundang-undangan," Lanjut Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia menilai pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk ke depannya yakni menghapuskan narasi politik kebencian. Menurutnya, kontestasi yang sudah berlalu perlu dirayakan dengan sebagai sebuah mekanisme koreksi. Sebab, mekanisme evaluasi dalam negara demokrasi itu wajib.

"Kita harus *mikul dhuwur, mendhem jero*. Tidak lagi menghujat. Apa yang sudah tapi ya itu jadi catatan jadi catatan, tapi kita harus *move on*, harus memandang ke depan, harus bersama-sama, nggak ada lagi politik kebencian, nggak ada narasi kebencian, nggak ada hujat-hujatan," jelasnya. **hal/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Konektivitas Internet Sudah Capai 80 Persen



FOTO: MRI/PDT

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid saat menghadiri Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, memberikan apresiasi atas pencapaian selama 10 tahun terakhir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun konektivitas internet dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, saat ini pengguna internet di Indonesia telah mencapai 80 persen, yang berarti hampir seluruh penduduk memiliki hak atas akses informasi.

“Ini sesuai dengan pesan dalam pembukaan UUD 1945. Ini adalah pencapaian yang luar biasa,” ungkap Meutya menanggapi Pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR,

di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8). Ia juga menekankan bahwa pencapaian ini tidak hanya sebatas konektivitas, tetapi juga membuka peluang untuk kemajuan lain di era digital.

Ia menyebut INA Digital, sebuah platform digital yang dimiliki pemerintah, sebagai pintu masuk bagi berbagai inovasi di masa depan. “Apresiasi tinggi patut diberikan kepada pemerintah. Namun, ini baru langkah awal. Pemerintah berikutnya perlu melanjutkan pekerjaan rumah dalam menghadapi tantangan era digital,” tambah Meutya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi

menyampaikan rasa syukur atas perkembangan teknologi dan digitalisasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, lanjut Jokowi, Indonesia memiliki INA Digital sebagai layanan pemerintah yang terintegrasi secara digital, yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik

Jokowi juga mengungkapkan bahwa cakupan elektrifikasi dan internet di Indonesia terus meningkat. Ia mengklaim bahwa pada tahun 2024, cakupan elektrifikasi akan mencapai 99 persen, sementara cakupan internet ditargetkan mencapai 79 persen.

rnm/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Transisi Energi Hijau Dinilai Lamban



FOTO : DOK/FOT

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai transisi energi yang dijalankan pemerintah masih sangat lamban. Padahal pemerintah sudah menargetkan *net zero emission* maksimal pada tahun 2060, melalui transisi dari fosil ke energi hijau yang ramah lingkungan.

"Transisi energi memang dijanjikan pemerintah, tapi masih sangat lambat," ujar Sugeng usai mendengar Pidato Kenegaraan Presiden dalam sidang tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Politisi Fraksi Partai NasDem ini melihat ada banyak faktor

yang membuat transisi energi masih sangat lamban, namun yang paling utama adalah adanya tarik menarik kepentingan.

Dengankata lain, ia menilai, masih ada niat baik untuk mewujudkan itu semua. Namun sayangnya hal itu tidak diimplementasikan dengan *action plan* yang jelas, dan tidak langsung dilaksanakan dengan baik.

"Ada sejumlah tantangan untuk menuntaskan transisi energi hingga sampai pada tahap *zero emission*. Diantaranya terkait konstitusi atau undang-undang. Sejauh ini UU energi baru dan terbarukan sampai hari ini juga belum selesai kita susun, belum juga dituntaskan.

Padahal prinsip dasarnya telah kita sepakati bahwa memang kita sudah tidak bisa tidak untuk masuk ke energi baru terbarukan, karena energi fosil sudah tidak bisa lagi kita andalkan," paparnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap dengan sisa waktu yang ada, pemerintahan Joko Widodo dapat memaksimalkan target *net zero emission*. Tidak hanya itu, bahkan dalam pemerintahan ke depan juga bisa melanjutkan transisi energi yang sudah ada hingga benar-benar menghasilkan energi hijau yang ramah lingkungan dengan *net zero emission*.

ayu/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Presiden Tunjukkan Sikap Negarawan Sejati



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sesaat sebelum mengikuti Sidang Tahunan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan rasa harunya atas pidato Presiden Joko Widodo. Terlebih, ia mengapresiasi, permintaan maaf Presiden Jokowi kepada Rakyat Indonesia pada sidang kali ini.

"Lalu juga pidato Presiden Jokowi, saya cukup terharu beliau permohonan maaf kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia," ucap Habiburokhman di Gedung Parlemen,

Jakarta, Jumat (16/8).

Menurutnya, sosok Presiden Jokowi merupakan sosok negarawan sejati. Sikap itu, lanjutnya, ditunjukkan dalam pidato Presiden Jokowi menga-kui belum bisa memenuhi harapan bangsa Indonesia sepenuhnya.

"Kita berharap kepemimpinan ke depan Pak Prabowo bisa minimal sama baiknya dengan Pak Jokowi. Atau bahkan lebih baik dari pak Jokowi," ucapnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengaku kagum

dengan pidato sambutan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya pidato Puan tersebut lengkap menjabarkan persoalan bangsa lengkap dengan kritiknya.

Kritik ditujukan untuk pemerintah, maupun otokritik yang ditujukan untuk diri sendiri. "Pidato Mbak Puan lengkap, dengan kritiknya. Termasuk otokritik untuk kita sendiri. Benar-benar Mba Puan ialah negarawan kekinian. Pidatonya tidak bikin ngantuk tapi syarat akan informasi dengan harapan-harapan," paparnya. **tn, ayu/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Jangan Ada Kompromi dengan Mafia Tanah



FOTO: CIK/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI, DPD RI, dan Sidang Paripurna DPR RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN TA 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta menyatakan pemerintah harus serius dalam menangani permasalahan mafia tanah yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Ia pun dengan tegas meminta pemerintah tidak melakukan kompromi-kompromi dengan mafia tanah dan melawan mereka dengan kekuatan konstitusional.

"Tentu ini menjadi konsen kita bersama, itu (mafia tanah) harus kita lawan dan prinsipnya negara harus hadir. Kemudian kita sebagai negara, kita sebagai bangsa, jangan pernah berkompromi dengan penjahat, jangan pernah berkompromi dengan

kejahatan apapun termasuk mafia tanah. Ada *backing-backing* itu harus dilawan dengan kekuatan sosial yang konstitusional," kata Riyanta saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan dalam Rangka Penyampaian RUU APBN TA 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Legislator Dapil Jawa Tengah III ini menilai, maraknya mafia tanah di berbagai daerah tak dipungkiri juga dikarenakan lemahnya regulasi yang negara miliki terkait pertanahan. "Banyak regulasi yang belum bagus, contoh aturan-aturan peninggalan zaman Belanda pun masih ada yang dipakai. Kemudian juga munculnya

aturan-aturan yang tumpang tindih di internal BPN sendiri maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan kementerian lain," terangnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini memberi contoh terkait permasalahan tanah yang terjadi di D.I. Yogyakarta, yang mana dalam kasus ini terjadi multi tafsir yang berkaitan dengan tanah negara dan tanah kesultanan. Untuk itu, Riyanta meminta semua *stakeholder* yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi terkait pertanahan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah serupa. **we/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sarapan Gratis Diharapkan Tingkatkan Kualitas Hidup Pelajar



FOTO : HANI/PDT

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono saat Sidang 16 Agustus di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya akan membawa rakyat Indonesia kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Ia pun ingin pemerataan ekonomi terjadi hingga ke satuan masyarakat terkecil, yaitu rumah tangga.

Pernyataan ini dirinya utarakan jelang Sidang 16 Agustus di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Salah satu program pemerintah yang ia nantikan dampaknya ialah Program Makan

Siang Gratis, yang kini berubah menjadi Program Sarapan Bergizi Gratis untuk pelajar setingkat sekolah dasar (SD).

"Tampak kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Program (Sarapan Bergizi Gratis) ini, harus memberikan dampak kepada masyarakat kecil kita, terutama anak-anak," ungkapnya saat ditemui oleh **Parlementaria**.

Jika program yang diunggulkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil, menurutnya, berpotensi memperbaiki kualitas hidup rakyat. "Kalau program ini bagus, menurut saya, ini akan mempercepat tingkat kesejahteraan rakyat," tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat.

Sebagai informasi, Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Program Makan Siang Gratis berubah menjadi Program Sarapan Bergizi Gratis untuk pelajar pada Jumat (31/5) lalu. Perubahan ini diketahui sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Namun, sampai saat ini, belum ditentukan kementerian atau lembaga yang akan menangani penerapan dari program tersebut. Walaupun begitu, sejumlah prediksi menyatakan bahwa Badan Pangan Nasional yang akan berpotensi yang akan menerapkannya. **um/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya





TAHAPAN DAN JADWAL PEMILU SERENTAK 2024



**ENDRO SUSWANTORO
YAHMAN**

Anggota Komisi II DPR RI

"Untuk Pilkada serentak kali ini mungkin yang perlu dicermati supaya berkualitas. Ini adalah kaitannya dengan netralitas ASN. Khususnya, kita tahu bahwa pilkada serentak kali ini lebih dari 50 persen itu kepala daerahnya dijabat oleh penjabat,"

Kasus Viral KDRT Tandai Perempuan Belum Merdeka



FOTO: MRI/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah sesaat sebelum mengikuti menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jumat (16/8/2024).

Tak henti-henti publik dikejutkan dengan kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Terbaru, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami atlet Anggar sekaligus selebgram bernama Cut Intan Nabila.

Melihat terus adanya kasus kekerasan pada perempuan, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai meski Indonesia telah merdeka sejak 79 tahun yang lalu, namun, kemerdekaan tersebut belum dirasakan semua perempuan di Indonesia. Untuk itu, perbaikan

berbagai sektor penting untuk dapat menghilangkan kejahatan dan kekerasan pada perempuan.

"Bayangkan 79 tahun Indonesia merdeka tidak semua perempuan merasakan kemerdekaan, dalam konteks ketika kita merasakan ada masih banyak perempuan-perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Ini adalah bagian yang harus kita perbaiki seluruhnya," kata Ledia kepada Parlemen, di Gedung DPR RI, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jumat (16/8).

Untuk itu, di momen Kemerdekaan

Indonesia kali ini, Politisi Fraksi PKS ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama saling menjaga, melindungi dan menghormati. Hal ini dapat ditanamkan mulai dari keluarga, yakni bagaimana laki-laki dan perempuan mampu saling bekerja sama dalam membangun keluarga yang baik.

"Bagian dari upaya membangun sebuah negeri yang lebih baik, yang beradab itu dimulai dari keluarga, keluarga anda harus anda jaga harus anda pelihara, harus ada sayangi dan kembangkan semua potensinya," harapnya. **bia/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Harus Wujudkan Pembangunan Lebih Merata



FOTO: CTK/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, dan Sidang Paripurna DPR RI dalam Rangka Penyampaian RUU APBN TA 2025 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap dengan direncanakannya kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dapat membuat pembangunan di daerah lebih merata.

“Dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang juga dibahas dan juga ditetapkan oleh Komisi XI, bersama dengan pemerintah. Karena memang harus kita akui selama ini pembangunan kita

masih sangat java centris,” kata Puteri menanggapi Pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Diketahui, dalam penyampaian Presiden Joko Widodo, meningkatnya TKD tersebut untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Target TKD tersebut direncanakan meningkat bila dibandingkan dengan target dalam APBN 2024 sebesar Rp 857,59 triliun.

Dengan naiknya TKD ini, Legislator Dapil Jawa Barat VII ini berharap

pembangunan menjadi lebih adil dan berkelanjutan. “Dari Sumber Daya Alam di tiap masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu nanti bisa membantu masing-masing gubernur dan juga bupati/wali kota yang terpilih nanti dari Pilkada Tahun ini untuk bisa melaksanakan seluruh program-programnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan dengan kenaikan TKD ini, presiden tidak lagi mengeluhkan bahwa anggaran daerah lebih banyak dipakai untuk perjalanan dinas atau untuk anggaran-anggaran yang sifatnya internal kebutuhan internal. **we/rdn**



Larangan Jilbab Paskibraka Putri Jadi Keresahan



FOTO: CTK/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetya jelang agenda Sidang 16 Agustus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetya menilai pelarangan Paskibraka putri menggunakan jilbab menjadi keresahan banyak pihak, mulai dari para tokoh, pimpinan organisasi, maupun lembaga pemerintah. Ia sendiri pun mengaku prihatin atas kejadian tersebut.

"Saya secara pribadi dan juga Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan sekaligus mengemukakan pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri ya pada saat pengu-kuhan dan katanya pada saat upacara

17 Agustus di IKN," ujar Netty di selasar Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8)

Tentu saja siapapun pihak yang melakukan pelarangan, lanjutnya, harus melakukan klarifikasi sekaligus bertanggung jawab. Sebab, menurutnya, pelarangan ini adalah sebuah tindakan pelecehan dan perendahan pada nilai Pancasila itu sendiri dalam demokrasi.

"Konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Jadi, kalau kemudian selama

78 tahun tidak pernah ada pelarangan dan pada tahun yang ke-79 ya ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini dicerai dengan pelarangan jilbab, tentu kita menuntut kepada siapapun, termasuk yang terindikasi katanya BPIP untuk melakukan pencabutan larangan tersebut," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Kedua, lanjutnya, ia menilai bahwa pihak yang diminta konsen atau menandatangani surat kesediaan melepaskan jilbab itu adalah anak di bawah umur. Menurutnya, hal itu juga melanggar hak dan perlindungan anak Indonesia. **hal/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Investigasi Kasus Bunuh Diri Mahasiswi Undip



FOTO: CTK/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian jelang agenda Sidang 16 Agustus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Seorang mahasiswi PPDS Anestesi Undip ditemukan meninggal di kamar kosnya beberapa waktu silam. Dugaan perundungan pun menyeruak, melatarbelakangi peristiwa nahasnya perempuan berusia 30 tahun itu yang mengakhiri hidupnya. Hal itu menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

"Tentu saya sangat terkejut dan berduka mendalam atas kejadian tragis yang menimpa mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)

Anestesi Universitas Diponegoro (Undip). Bunuh diri yang terjadi telah mengundang perhatian luas dan memunculkan dugaan mengenai praktik *bullying* yang mungkin dialami oleh almarhumah. Saya, sebagai salah satu pimpinan Komisi X DPR RI, sangat prihatin dengan situasi ini dan merasa penting untuk menanggapi dengan serius," tutur Hetifah di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Dalam pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mendesak pihak universitas dan otoritas terkait beserta

pihak Kepolisian segera melakukan investigasi. Ia meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kebenaran di balik kejadian ini.

"Penting untuk memastikan bahwa semua faktor penyebab dapat diidentifikasi dan bahwa tindakan yang sesuai diambil terhadap semua pihak yang terlibat. Kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem dan prosedur yang ada di lingkungan akademik, terutama dalam hal kesejahteraan mental mahasiswa," tambahnya. **uc/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Estafet Berganti, Keberlanjutan Pembangunan Dinanti



FOTO: GER/PDT

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Tandjung jelang agenda Sidang 16 Agustus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Tandjung berharap pergantian estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, dapat meneruskan program kerja yang dinilai baik pada periode sebelumnya.

Menurutnya, asas 'keberlanjutan' terutama berkaitan pembangunan nasional menjadi krusial lantaran demi mengejar target Indonesia Emas 2045. Jika mencapai cita-cita ini,

dirinya menilai Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki pendapatan yang sejajar dengan negara-negara maju.

Demikian hal tersebut disampaikan saat ditemui oleh **Parlamentaria** jelang agenda Sidang 16 Agustus di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Ia berharap kabinet pemerintahan selanjutnya menerapkan nilai 'keberlanjutan' dalam program kerja yang disusun.

"Pilpres (pemilihan presiden) kemarin, rakyat sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Salah satunya yang

dikampanyekan adalah keberlanjutan. Jadi, di kabinet nanti harus dibicarakan tentang program ke depan yang disiapkan," terang Doli, sapaan akrabnya.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap pemerintah yang nantinya akan menjabat terbuka dengan berbagai aspirasi. Pasalnya, aspirasi rakyat Indonesia bernilai penting untuk dipertimbangkan agar rakyat terwakilkan dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Harapannya, keadilan dan kemakmuran bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. **um/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Pembangunan Nasional Indonesia Emas 2045



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara DPR RI.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara Tahun 2024 resmi digelar di Ruang Rapat Paripurna 1, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8). Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dirayakan tanggal 17 Agustus setiap tahunnya.

Dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Bamsoet sapaan

akrabnya, menyatakan momentum peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa telah bergerak maju, masih stagnan, atau justru mundur ke belakang.

Terlebih Indonesia telah mencaangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Terkait hal itu, Bamsoet menegaskan cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan

menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Untuk itu, Majelis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin, yang terus mendorong Indonesia bergerak maju dan membuktikan sebagai negara yang besar," ujar Politisi Partai Golkar tersebut. **pun/aha**



Semarak di Sidang Tahunan 2024



FOTO: RSB/PDT

Sejumlah menteri dan tokoh-tokoh bangsa saat menghadiri Sidang Tahunan 2024 di Gedung Nusantara, Jumat (16/8/2024).

Sejumlah menteri dan tokoh-tokoh bangsa menghadiri Sidang Tahunan 2024 di Gedung Nusantara, Jumat (16/8).

Sidang rutin tiap tahun ini mengumpulkan tidak hanya pimpinan parlemen namun seluruh perangkat negara hadir bersama dengan perwakilan negara sahabat lainnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat menghadiri dengan kebaya motif emas. Kebaya tersebut memiliki makna semangat, kesuksesan dan kemenangan yang terpancar dalam memperingati 79 tahun Indonesia

merdeka.

Di sisi lain, sejumlah menteri terlihat telah tiba di Kompleks Parlemen, untuk mengikuti sidang hari ini. Mereka ialah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menkominfo, Budi Arie Setiadi, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Sidang Tahunan 2024 akan terdiri dari tiga agenda, yaitu Sidang Tahunan MPR RI dalam rangka HUT RI yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo

dan para tamu undangan. Kemudian, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Pada agenda Sidang bersama DPR dan DPD, Puan menyampaikan pidato kenegaraan.

Lalu, agenda ketiga pada rangkaian Sidang Tahunan adalah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024. Di agenda ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terbaik dan Terfavorit Parlemen Remaja 2023



FOTO: RSB/PDT

Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam foto bersama usai menerima audiensi peserta terbaik dan terfavorit Parlemen Remaja tahun 2023, di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi peserta terbaik dan terfavorit Parlemen Remaja tahun 2023 lalu. Hal itu lantaran mereka telah ikut menyosialisasikan kerja dan kinerja DPR RI yang dilihatnya secara langsung, kepada masyarakat luas usai mengikuti Program tersebut.

"Mereka ini peserta terbaik dan terfavorit dalam Parlemen Remaja (Parja) tahun 2023 lalu. Usai mengikuti kegiatan tersebut dan kembali ke daerahnya masing-masing, mereka ikut menyosialisasikan kepada keluarga, teman-teman, tetangga dan masyarakat tentang kerja serta

kinerja DPR RI yang dilihatnya secara langsung, bukan yang mereka dengar dan baca dari media massa dan media sosial. Tentu bukan hanya mereka, tetapi semua peserta Parja," ujar Indra Iskandar usai menerima audiensi peserta terbaik dan terfavorit Parlemen Remaja tahun 2023, di Jakarta, Kamis (15/8).

Tidak hanya itu, lanjut Indra, peserta Parja juga ikut dalam permainan simulasi atau bermain peran. Layaknya Anggota DPR RI, peserta Parja diminta untuk menggelar rapat dan sidang-sidang untuk membahas undang-undang, maupun sebuah kasus. Peserta Parja pun diikuti dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Dari sana diakui oleh mereka, tidak mudah berperan sebagai anggota DPR dengan berbagai tugas dan fungsi yang harus dijalankannya. Bahkan dalam membahas undang-undang tidak jarang DPR rapat hingga dini hari.

Sebagai informasi, keenam peserta terbaik dan terfavorit Parja tahun 2023 itu adalah Ni Made Cista Striratna dari Bali, Eugene Irwanto Willim dari Kalimantan Barat, Dania Azahra Ayusti dari Lampung, Sabitah Widya Kirana dari Jawa Tengah, Muhammad Rivaldi Ka'bah dari Jawa Timur, dan Hugo Ernesto Hamdri dari Kalimantan Utara.

— ayu/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Undang Para Teladan Seluruh Indonesia



Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini.

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, mengungkapkan dalam sidang tahunan dan sidang bersama DPR, DPD RI dan MPR RI tahun ini Setjen DPR RI mengundang para teladan dari berbagai instansi atau bidang di seluruh Indonesia.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan sidang tahunan dan sidang bersama DPR RI, DPD RI dan MPR mengundang para teladan dari berbagai instansi seluruh Indonesia untuk hadir ke

gedung DPR RI, Senayan Jakarta ini. Di tahun ini jumlahnya sekitar 500 orang, namun karena keterbatasan tempat yang bisa masuk ke gedung Paripurna kurang lebih hanya 80 orang. Sisanya bisa menyaksikan di Gedung Nusantara IV,” ujar Supri saat persiapan sidang bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Sementara itu salah satu teladan yang ditemui **Parlementaria** mengaku sangat bangga dan bahagia bisa hadir di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta yang notabene merupakan gedung

bersejarah bagi bangsa Indonesia. Apalagi berkesempatan melihat secara langsung para pemimpin negeri.

“Kami merasa, sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir dalam acara sidang tahunan MPR RI, sehingga kami mendapatkan apresiasi dan pemerintah Republik Indonesia. kami mendapat penghargaan sebagai teladan nomor satu untuk kategori Wana lestari tingkat nasional, kategori kelompok pencinta alam,” ujar Taufan Abdi salah satu teladan nasional kelompok pencinta alam. **ayu/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Ajak Jajaran Birokrasi DPR-DPD-MPR Satukan Langkah



FOTO: JKA/PDT

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Inosentius Samsul dalam sambutannya pada upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri oleh para pejabat dan staf Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI, Inosentius Samsul mengajak seluruh jajaran birokrasi pendukung di lembaga legislatif untuk bersatu padu dalam mewujudkan lembaga legislatif yang lebih baik. Ajakan ini disampaikan dalam sambutannya pada upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri oleh para pejabat dan staf Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI.

Bertindak selaku inspektur upacara, Inosentius menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen

supporting system, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Sistem Pendukung (TSP), dalam memperingati kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan.

"Kita patut bersyukur karena upaya kita bersama telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan survei Litbang Kompas Juni 2024, citra baik DPR RI mencapai 62,6 persen, naik 12,1 persen dibandingkan Desember 2023. Sementara itu, citra baik DPD RI berada di level 68,6 persen, naik 11,4 persen. Ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat yang signifikan," ujar pria yang kerap disapa Sensi

ini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (17/8).

Lebih lanjut, dalam pidatonya dia memaparkan tema peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini, "Nusantara Baru Indonesia Maju," yang relevan dengan tiga transisi penting yang dihadapi Indonesia, yaitu penyambutan ibu kota baru, pergantian pemimpin nasional, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Inosentius menyatakan bahwa lembaga legislatif dapat mengadopsi tema spesifik "Lembaga Legislatif Baru, Harapan Baru," mengingat akan adanya wajah baru di parlemen pasca Pemilu 2024. **ssb/rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

UU Permuseuman Lestarikan Warisan Budaya



FOTO: MUN/PDT

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat membuka Focus Group Discussion Urgensi dan Arah Pengaturan RUU Permuseuman di UIGM, Palembang, hari Selasa (13/08/2024).

Putu Supadma Rudana menekankan perlunya undang-undang permuseuman untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang cagar budaya, tidak ada aturan khusus yang mengatur pengelolaan museum sebagai tempat penyimpanan artefak budaya.

“Sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan luar biasa dalam bidang heritage, warisan leluhur, budaya dan seni budaya. Tentu harus

memiliki sebuah payung hukum yang komprehensif guna bisa merumahkan atau menempatkan kemuliaan budaya seperti dalam bentuk artefak di sebuah tempat yaitu museum,” kata Putu saat FGD Urgensi dan Arah Pengaturan RUU Permuseuman di Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Selasa (13/8).

Putu menambahkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang Cagar Budaya dan Undang-undang Kemajuan Kebudayaan, masih diperlukan Undang-undang khusus tentang permuseuman. “Kita memang

sudah punya undang-undang cagar budaya yaitu undang-undang kemajuan kebudayaan, tapi harus ada sebuah undang-undang permuseuman,” tambahnya.

Menurut Putu, undang-undang permuseuman sangat penting untuk memastikan artefak-artefak berharga ditempatkan dengan baik dan dikelola secara profesional di museum. Putu percaya bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, Indonesia dapat lebih efektif mempromosikan kemuliaan seni dan budaya Nusantara ke seluruh dunia.

mun/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



MENANGIS DAN TERTAWA BERSAMA RAKYAT

NANDA AINUN OCTAFIANI

MY ESTI WIJAYATI



Tanggal 29 Agustus DPR RI tepat berusia 79 tahun, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang lembaga legislatif ini dalam memperjuangkan suara rakyat. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, peran DPR RI semakin vital dalam menjaga kestabilan dan kemajuan negara.

Lalu bagaimana sih suka duka dan cerita dibalik tugas seorang anggota dewan ?

Saksikan podcast Sudut Dengar Parlemen episode
"79 TH DPR RI, MENJAGA KONSTITUSI DAN HATI NURANI"

Anda dapat menyaksikan dengan scan QR berikut :



Bersama narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi PDIP, Dapil DI Yogyakarta, Ibu My Esti Wijayati dan host spesial Nanda Ainun Octafiani, Penelaah Teknis Kebijakan, Bagian Perjalanan, Setjen DPR RI.